



Diterima Redaksi	Direvisi Terakhir	Diterbitkan <i>Online</i>
15 Juni 2025	28 Juni 2025	30 Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.58518/awwaliyah.v8i1.3764		

DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA ERA ORDE BARU: TANTANGAN DAN PELUANG

Dewi Masruroh¹, Moh Kusno², Moh. Fiqih Firdaus³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

E-mail: ¹23862081488@iai-tabah.ac.id, ²kusno@iai-tabah.ac.id, ³fiqih@iai-tabah.ac.id

Abstrak: Pendidikan Islam pada masa Orde Baru (1966–1998) mengalami dinamika kompleks di tengah tekanan ideologis dan kebijakan pemerintah yang otoriter dan sentralistik. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep dan kebijakan pendidikan Islam pada era tersebut serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam proses pembangunannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pengumpulan data dari jurnal ilmiah, artikel, dan literatur terkait yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendidikan Islam mengalami represi ideologis akibat kebijakan penataran P4 dan doktrinasi politik, terdapat peluang signifikan seperti pengakuan madrasah setara dengan sekolah umum, kewajiban pelajaran agama Islam di seluruh jenjang pendidikan, serta pendirian lembaga strategis seperti Majelis Ulama Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia. Tantangan utama berupa sistem pendidikan yang sentralistik, pembatasan kebebasan akademik, dan penyeragaman budaya menjadi hambatan besar dalam pengembangan pendidikan Islam yang progresif. Kesimpulannya, pendidikan Islam pada masa Orde Baru mengalami transformasi yang membentuk arah dan identitas lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Temuan ini penting untuk merumuskan strategi pengembangan pendidikan Islam yang lebih inklusif dan adaptif di masa depan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Islam, Orde Baru.

Abstract: *Islamic education during the New Order era (1966–1998) experienced complex dynamics amid ideological pressures and authoritarian, centralized government policies. This study aims to examine the concepts and policies of Islamic education during this period and identify the challenges and opportunities that emerged in its development process. The method used is a literature review, collecting data from relevant scholarly journals, articles, and related literature. The findings show that although Islamic education faced ideological repression due to the mandatory P4 indoctrination and political doctrines, significant opportunities arose, such as the recognition of madrasahs as equal to public schools, compulsory Islamic religious lessons at all education levels, and the establishment of strategic institutions like the Indonesian Ulama Council and Bank Muamalat Indonesia. Major challenges included a*





centralized education system, restrictions on academic freedom, and cultural homogenization, which hindered the development of progressive Islamic education. In conclusion, Islamic education during the New Order experienced transformations that shaped the direction and identity of Islamic educational institutions in Indonesia. These findings are important for formulating more inclusive and adaptive strategies for the future development of Islamic education.

Keywords: *Education Policy, Islamic Education, New Order.*

Pendahuluan

Pendidikan Islam merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang memiliki tujuan membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Konsep pendidikan dalam Islam tidak hanya mencakup pengembangan intelektual, tetapi juga spiritual dan moral. Istilah "pendidikan" berasal dari kata Latin *educare* dan dalam bahasa Arab disebut *tarbiyah*, yang menekankan pada proses pembinaan dan pengarahan potensi manusia menuju kehidupan yang bermakna. Dalam konteks ini, konsep pendidikan Islam mengedepankan prinsip-prinsip pembimbingan terhadap perkembangan aspek spiritual dan fisik peserta didik, sebagaimana dirumuskan dalam pertemuan pendidikan Islam se-Indonesia pada tahun 1960 (Tolchah, 2015). Pendidikan adalah upaya kolektif untuk mewariskan warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan membuat generasi ini menjadi teladan bagi generasi yang lalu (Alfiyanti, 2023).

Pada masa Orde Baru (1966–1998), pendidikan Islam berada dalam posisi yang unik. Di satu sisi, rezim Soeharto menerapkan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik dan menekankan stabilitas politik serta ideologi negara melalui pendidikan. Salah satu kebijakan kontroversial adalah penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang wajib diikuti oleh seluruh pelajar dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan dijadikan alat doktrinasi ideologi negara, sehingga kebebasan akademik, pluralitas, dan nilai-nilai keislaman tidak mendapat tempat yang optimal. Sistem yang konformistik dan otoriter ini menjadi tantangan besar bagi berkembangnya pendidikan Islam yang kontekstual dan progresif.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan struktural dan ideologis, pendidikan Islam pada masa Orde Baru juga menemukan sejumlah peluang. Pemerintah mengakui eksistensi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan memberikan status serta hak yang setara dengan sekolah umum (Adibah, 2020). Bahkan, pelajaran agama Islam diwajibkan di semua jenjang pendidikan. Selain itu, berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI), disahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 Tahun 1989), serta tumbuhnya lembaga ekonomi syariah seperti Bank



Muamalat Indonesia menunjukkan adanya penguatan posisi Islam dalam ranah kebijakan negara.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu, pendidikan Islam pada masa Orde Baru sering kali dipandang dari dua sisi yang kontras: sebagai korban represi ideologis negara sekaligus sebagai subjek yang mampu beradaptasi dan berkembang. Penelitian-penelitian tersebut umumnya belum secara menyeluruh mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan Islam di era ini mempengaruhi transformasi lembaga-lembaga seperti pesantren dan madrasah. Masih terdapat kesenjangan dalam pemetaan dampak struktural maupun kultural terhadap arah dan isi pendidikan Islam yang berlangsung pada masa itu (Jailani & Muhammad, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam prosesnya. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana pendidikan Islam membentuk identitas dan perannya dalam masyarakat Indonesia modern, khususnya di tengah tekanan ideologis dan politik dari negara. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat merumuskan strategi pengembangan pendidikan Islam yang lebih kontekstual, inklusif, dan adaptif di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode library research atau studi kepustakaan sebagai pendekatan utama dalam menggali dinamika pendidikan Islam di Indonesia pada era Orde Baru. Metode ini dipilih untuk memperoleh data dan informasi yang mendalam melalui telaah literatur yang relevan, valid, dan terkini. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder berupa artikel ilmiah, buku, dan dokumen akademik yang tersedia di platform jurnal bereputasi internasional seperti Scopus serta Google Scholar. Dengan memanfaatkan kedua sumber tersebut, peneliti mampu mengakses kajian-kajian yang komprehensif terkait tantangan dan peluang pendidikan Islam pada masa tersebut, sehingga memperkuat landasan teori dan analisis penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan memilih, menyeleksi, dan menganalisis literatur yang membahas aspek-aspek kunci pendidikan Islam di era Orde Baru, termasuk kebijakan pemerintah, perkembangan kurikulum, dan respon masyarakat Islam. Pendekatan studi kepustakaan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian kritis terhadap berbagai perspektif dan temuan sebelumnya, sekaligus mengidentifikasi ruang bagi peluang pengembangan pendidikan Islam pada konteks sejarah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual yang signifikan dan menjadi referensi bagi pengembangan pendidikan Islam di masa depan, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan sosial dan politik.



Hasil dan Pembahasan

1. Konsep dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Era Orde Baru

Konsep dapat diartikan sebagai ide atau gambaran mental yang bersifat abstrak dan digunakan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek, kejadian, proses, atau fenomena yang memiliki ciri atau atribut yang sama. Konsep juga merupakan representasi intelektual yang membantu memahami realitas kompleks dengan menyederhanakan dan menggeneralisasi berbagai hal yang konkret maupun abstrak (Arum, 2020). Sedangkan kebijakan mencakup seperangkat ide dan prinsip fundamental yang membimbing dan mendasari perencanaan dalam menjalankan tugas, memimpin, serta bertindak. Konsep ini relevan bagi pemerintah, berbagai organisasi, kelompok sektor swasta, hingga setiap individu (Nurmala, 2020).

Pendidikan mempunyai asal-usul dari bahasa yang digunakan di Yunani, yakni kata *paedagogie* yang memiliki makna pengarahan atau tuntunan yang ditujukan kepada anak-anak. Kata tersebut selanjutnya diubah ke dalam bentuk bahasa Inggris menjadi “education,” yang berarti proses perkembangan atau pemberian arahan. Sementara itu, dalam penggunaan bahasa Arab, istilah ini kerap diterjemahkan sebagai “tarbiyah”, yang maknanya adalah kegiatan mendidik atau proses pendidikan.

Pembelajaran dalam ajaran Islam merupakan tahapan perubahan dan penanaman wawasan serta prinsip-prinsip Islami kepada siswa atau pelajar. Proses ini dilakukan dengan cara membina dan memajukan kemampuan dasar alami mereka guna meraih keharmonisan dan kebermaknaan hidup secara utuh di semua bidang kehidupannya.. Berdasarkan hasil pertemuan pendidikan Islam se-Indonesia pada tahun 1960, pendidikan Islam dijelaskan sebagai pembimbingan terhadap perkembangan aspek spiritual dan fisik peserta didik, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Proses ini dilakukan dengan kebijaksanaan melalui pemberian petunjuk, penyampaian ilmu, pembinaan keterampilan, perawatan, dan pengawasan dalam penerapan seluruh nilai dan prinsip Islam (Hakiki, 2015).

Orde Baru merupakan tata kelola negara yang berbeda dan mulai diterapkan di wilayah Indonesia sejak tanggal 11 Maret 1966. Masa ini berakhir pada tahun 1998 setelah tatanan pemerintahan baru dibentuk melalui proses pemilihan umum. Kepemimpinan dalam era Orde Baru merupakan rezim yang dikendalikan oleh presiden Soeharto.

Pada tahun 1966, dimulailah kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Pada awalnya, umat Islam sangat berharap agar pemerintahan Orde Baru memberikan perhatian terhadap nasib pendidikan Islam. Namun, harapan tersebut belum terwujud karena kebijakan politik pemerintah Orde Baru yang terkadang tidak sejalan dengan keinginan umat Islam.



Masa Orde Baru di Indonesia dimulai pada 11 Maret 1966 dan berakhir dengan peralihan kepemimpinan dari Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie pada 21 Mei 1998. Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa perubahan signifikan dalam strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional. Orde Baru menekankan pada pemurnian Pancasila dan pemberantasan pengaruh komunisme, yang sebelumnya dominan dalam Orde Lama. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan agama Islam mendapatkan perhatian lebih, dengan tujuan memperkuat ideologi Pancasila melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Aspek yang sangat meresahkan kebijakan pendidikan pada era Orde Baru adalah pola doktrinasi, yang berarti paksaan terhadap ideologi-ideologi dalam sistem pemerintahan Orde Baru agar selalu terpatri dalam ingatan anak-anak. Terlebih lagi, sejak dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi diwajibkan mengikuti penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang di dalamnya mencakup hafalan terhadap unsur-unsur Pancasila (M. Huda, 2022).

Evolusi pendidikan Islam pada era Orde Baru secara bertahap menunjukkan kemajuan yang signifikan. Salah satunya, institusi-institusi pesantren mulai mendirikan madrasah dalam struktur pendidikannya. Dalam struktur ini, jenjang-jenjang pendidikan dibagi menjadi Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Struktur madrasah ini mendorong kemajuan pesantren sehingga jumlahnya bertambah pesat. Pada tahun 1958/1959, pemerintah Indonesia memperkenalkan Madrasah Wajib Belajar (MWB), yang memberikan hak dan kewajiban setara dengan sekolah negeri. Kemudian, pada tahun 1965, dalam Seminar Pondok Pesantren di Yogyakarta, disepakati bahwa pondok pesantren perlu menambahkan pelajaran keterampilan, seperti pertanian dan pertukangan. Hal ini mendorong tokoh-tokoh Islam untuk menuntut agar madrasah dan pendidikan keagamaan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Pendidikan Islam, terutama pesantren dan madrasah, mengalami transformasi besar selama Orde Baru. Pesantren, yang sebelumnya dianggap kolot, kini mendirikan madrasah dengan sistem pendidikan yang dinamis, dengan jenjang Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Tradisi ini dianggap sebagai tradisi unik yang memunculkan harapan bagi masa depan bangsa. Madrasah berfungsi sebagai wahana bagi anak untuk mengikuti pembelajaran serupa sekolah dan menggabungkan pembelajaran agama dan umum. Secara kultural, madrasah memiliki konotasi khusus sebagai tempat memperoleh pembelajaran Islam, sehingga lebih dikenal sebagai sekolah agama.



2. *Tantangan Pendidikan Islam Era Orde Baru*

Tantangan didefinisikan sebagai hal atau situasi yang memicu dorongan untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi masalah atau hambatan yang ada (Hardiansyah, 2011). Selain itu, tantangan juga dapat berupa kesulitan atau perubahan yang harus dihadapi dalam berbagai konteks, seperti akademik, sosial, dan budaya, yang menuntut adaptasi dan pengembangan kemampuan agar tujuan dapat tercapai (Eliasaputra, 2020). Dengan kata lain, tantangan adalah kondisi atau perkara yang menuntut usaha dan keberanian untuk mengatasinya demi mencapai kemajuan atau hasil yang diinginkan.

Pada masa Orde Baru, pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan serius yang erat kaitannya dengan sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Penekanan pendidikan lebih difokuskan pada aspek kognitif dan mengabaikan dimensi afektif serta psikomotorik, yang mengakibatkan lahirnya pribadi-pribadi terdidik namun memiliki kepribadian terpecah.

Pemerintahan Orde Baru memiliki sejumlah ciri yang kurang mendukung tumbuhnya pendidikan Islam. Pertama, pemerintahan ini bersifat kokoh dan dominan. Kedua, kepemimpinan negara didukung oleh kekuatan militer yang bekerja sama erat dengan kalangan teknokrat dan birokrat sipil. Ketiga, untuk mempertahankan kekuasaannya, pemerintah memperkuat dirinya dengan aparat keamanan yang bersifat menindas serta alat-alat politik yang berideologi. Keempat, sejak awal, pemerintahan ini mendapat dukungan dari kekuatan kapitalisme global. Kelima, jika terjadi ketidakstabilan dalam pemerintahan Orde Baru, hal itu biasanya bukan disebabkan oleh kekuatan politik masyarakat yang semakin berkembang, melainkan lebih dipengaruhi oleh dinamika internal negara serta faktor-faktor dari situasi internasional.

Sistem pendidikan yang sentralistik dan konformistik juga telah mematikan kreativitas serta mengabaikan pluralitas peserta didik, menjauhkan pendidikan dari pendekatan yang reformis dan kontekstual. Selain itu, pembangunan pendidikan gagal meletakkan dasar-dasar pembentukan masyarakat yang disiplin dan mandiri, serta belum berhasil menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam percaturan global. Penindasan terhadap demokratisasi dan hak asasi manusia pun menjadi bagian dari sistem pendidikan saat itu, ditandai dengan terbatasnya kebebasan akademik, terabaikannya hak politik rakyat, serta stagnasi pendidikan politik bangsa. Pemerintahan Orde Baru juga mengabaikan kemajemukan budaya dengan pendekatan penyeragaman yang ekstrem, sehingga keberagaman dipinggirkan dalam proses pendidikan. Lebih jauh lagi, pendidikan dijadikan alat indoktrinasi politik melalui penanaman nasionalisme dan patriotisme yang kaku,



dengan pendekatan monologis dan hegemonik yang justru tidak efektif dalam membangun generasi kritis dan demokratis.

Karakteristik pemerintahan yang sangat kuat dan terpusat berkorelasi erat dengan tantangan politik dan struktural yang memengaruhi kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Kekuatan militer dan teknokrat sipil bekerja sama untuk membangun pemerintahan Orde Baru, yang menciptakan sistem pemerintahan yang dominan dan kurang terbuka terhadap keinginan masyarakat, termasuk pendidikan Islam. Pemerintah menggunakan aparat keamanan yang represif dan memanfaatkan alat-alat politik dan ideologi negara untuk menjaga kelanggengan kekuasaan. Selain itu, sejak awal kekuasaannya, rezim ini mendapatkan dukungan dari kekuatan kapitalisme internasional, yang berdampak pada kebijakan nasional. Ketidakstabilan lebih sering disebabkan oleh dinamika internal negara atau tekanan global daripada kekuatan rakyat.

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang berlaku dari tahun 1973 hingga 1998, digunakan sebagai referensi untuk kebijakan pendidikan. Menurut Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966, tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan orang Indonesia yang berjiwa Pancasila, cerdas, mahir, berbudi luhur, dan memiliki kepribadian nasional yang bertanggung jawab atas kemajuan. Namun, dalam kenyataannya, kebijakan ini lebih menekankan pada mencapai stabilitas politik dan pembentukan warga negara yang patuh, sehingga tidak memberikan banyak ruang untuk pembangunan nilai-nilai pendidikan Islam.

3. *Peluang Pendidikan Islam Era Orde Baru*

Peluang merupakan konsep yang digunakan untuk memprediksi dan menganalisis kemungkinan hasil dalam berbagai bidang seperti statistik, keuangan, dan pengambilan keputusan (Rezzy Apriska Sofyeni, Nurhaswinda, Ratu Balqis, Ika Sucinta Erli, 2025). Pada masa Orde Baru, pendidikan Islam menunjukkan berbagai kemajuan yang cukup berarti. Pemerintah mewajibkan pelajaran agama Islam mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966. Madrasah pun mulai diperlakukan setara dengan sekolah umum dari segi status dan hak-haknya. Pesantren mendapat perhatian khusus melalui pemberian subsidi dan program pembinaan. Selain itu, berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975 menjadi langkah penting dalam memperkuat peran ulama dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Di bidang sosial, pemerintah juga menghentikan program SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) pada tahun 1993, sebagai respons terhadap berbagai kritik masyarakat terhadap praktik perjudian terselubung dalam program tersebut.



Selanjutnya, pemerintah memberi ruang bagi pelajar Muslimah untuk mengenakan rok panjang dan jilbab di sekolah negeri sebagai bentuk kebebasan berbusana sesuai ajaran agama. Di bidang legislasi, disahkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memperkuat posisi hukum pendidikan dan lembaga peradilan Islam di Indonesia. Pemerintah juga menerbitkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum bagi umat Islam, serta mendukung pendirian lembaga keuangan syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia, sebagai bentuk kemajuan ekonomi umat berbasis prinsip-prinsip Islam (Huda, 2022).

Pada awal abad ke-20, kesadaran umat Islam di Indonesia akan pentingnya kebersamaan mulai tumbuh secara signifikan. Masyarakat Muslim mulai menyadari bahwa perjuangan tidak bisa dilakukan secara individual, melainkan harus dilakukan secara kolektif melalui organisasi. Kesadaran ini ditandai dengan lahirnya berbagai organisasi Islam. Salah satu yang paling awal adalah Jami'at Khair di Jakarta pada tahun 1905, yang beranggotakan masyarakat keturunan Arab (Lukis Alam, 2020). Kemudian muncul Al Irsyad pada tahun 1911, sebagai kelanjutan dari Jami'at Khair. Di tahun yang sama, berdirilah Syarikat Dagang Islam (SDI), yang menjadi cikal bakal gerakan Islam yang lebih luas.

Perkembangan ini terus berlanjut dengan lahirnya Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1912, Persatuan Islam (Persis) di Bandung pada 1920, Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya tahun 1926, Al Jami'atul Washliyah di Medan pada 1930, dan Al Ittihadiyah juga di Medan pada 1935. Selain itu, masih banyak organisasi Islam lainnya yang muncul dan menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Secara umum, organisasi-organisasi ini bergerak di tiga bidang utama: dakwah dan keagamaan, pendidikan, serta sosial kemasyarakatan. Namun, tulisan ini akan lebih memfokuskan pada bidang pendidikan. Hampir semua organisasi Islam menjadikan pendidikan sebagai program prioritas mereka. Mereka aktif membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, sekolah, madrasah, hingga perguruan tinggi, sebagai bagian dari upaya mencerdaskan umat dan memperkuat identitas keislaman di tengah dinamika zaman.

Masuknya ide-ide pembaruan dalam pemikiran Islam pada awal abad ke-20 turut memengaruhi cara pandang organisasi-organisasi Islam terhadap pendidikan. Kesadaran akan pentingnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum mulai menguat. Pendidikan Islam yang sebelumnya hanya menekankan pada aspek keagamaan mulai terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern (Yuningsih, 2016). Gagasan pembaruan ini secara perlahan meresap ke dalam sistem pendidikan Islam, mendorong perubahan baik dari segi kurikulum, metode pengajaran, hingga tata kelola lembaga pendidikan (Aniek Rahmaniah, 2011).



Perubahan tersebut tampak nyata dalam beberapa aspek. Kurikulum pendidikan Islam, yang dulunya hanya berisi pelajaran-pelajaran agama, mulai dilengkapi dengan pelajaran umum seperti sains, bahasa, dan ilmu sosial. Dari sisi sistem pengajaran, pola non-klasikal yang bersifat tradisional mulai bergeser menuju sistem klasikal yang lebih terstruktur dan sistematis. Metode pengajaran pun mengalami pembaruan; jika sebelumnya hanya mengandalkan metode tradisional seperti membaca dan menghafal kitab, kini mulai digunakan metode-metode yang lebih variatif dan partisipatif. Tidak kalah penting, lembaga-lembaga pendidikan Islam juga mulai menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern guna meningkatkan efektivitas dan mutu Pendidikan (Khoiruddin, 2018).

Integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum ini telah menjadi perhatian utama sejak awal berdirinya organisasi-organisasi Islam. Muhammadiyah, misalnya, tampil sebagai pelopor pendidikan Islam modern yang memadukan nilai-nilai keislaman dengan pendidikan umum. Pada tahun 1923, Muhammadiyah di Yogyakarta telah berhasil mendirikan empat sekolah dasar dan merencanakan pembangunan sekolah HIS (Hollandsch-Inlandsche School) serta lembaga pendidikan guru. Perkembangan ini tidak hanya terjadi di Yogyakarta; Muhammadiyah juga aktif membuka sekolah di kota-kota lain seperti Jakarta. Bahkan, pada tahun 1932, cabang Muhammadiyah di Jawa Tengah telah memiliki 165 sekolah dengan sistem pendidikan model pemerintah (gubernemen), selain 68 sekolah agama yang umumnya beroperasi pada siang dan sore hari. Hal ini menunjukkan keseriusan organisasi Islam dalam menjadikan pendidikan sebagai sarana transformasi sosial dan pembentukan karakter umat Islam di tengah arus modernitas (Huda et al., 2023).

Upaya integrasi ilmu agama dan ilmu umum dalam sistem pendidikan Islam ternyata tidak hanya dilakukan oleh Muhammadiyah. Beberapa organisasi Islam lainnya juga menunjukkan keseriusan dalam mengembangkan model pendidikan yang modern, kontekstual, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Langkah ini menegaskan bahwa pembaruan pendidikan Islam merupakan kesadaran kolektif di kalangan elite Muslim Indonesia awal abad ke-20. Di Majalengka, misalnya, Abdul Halim mendirikan Perserikatan Ulama pada tahun 1917. Dalam kongres organisasi tersebut, ia menggagas pendirian sebuah lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan pengetahuan umum, tetapi juga keterampilan praktis seperti kerajinan tangan, perdagangan, dan pertanian. Gagasan ini menekankan pentingnya pendidikan yang menyentuh kebutuhan hidup riil masyarakat, disesuaikan dengan bakat dan potensi peserta didik.

Sementara itu, di Bandung, Persatuan Islam (PERSIS) yang berdiri pada tahun 1920 di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Ahmad Hasan dan Muhammad Natsir juga mengembangkan lembaga pendidikan modern. Mereka mengelola



beragam jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah guru, termasuk sekolah-sekolah HIS dan MULO. Lembaga-lembaga ini dirancang untuk melahirkan generasi Muslim yang cakap dalam ilmu agama sekaligus siap berperan dalam masyarakat modern.

Di lingkungan Nahdlatul Ulama, bentuk integrasi serupa juga dilakukan. Pesantren Tebuireng, yang dikenal sebagai salah satu pesantren besar, mulai memasukkan pelajaran umum seperti menulis huruf latin, ilmu bumi, sejarah, dan bahasa Melayu atas persetujuan langsung dari pendirinya, K.H. Hasyim Asy'ari, dan dilaksanakan oleh K.H. Moh. Ilyas. Ini menunjukkan bahwa kalangan pesantren pun tidak menutup diri terhadap transformasi pendidikan yang lebih terbuka dan menyeluruh (Manageria et al., 2021).

Al Jam'iyatul Washliyah di Medan juga mengambil langkah serupa setelah mengirim delegasi ke Sumatera Barat pada tahun 1934. Sumatera Barat saat itu dianggap sebagai pusat pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Delegasi yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti M. Arsyad Thalib Lubis, Udin Syamuddin, dan Nukman Sulaiman sangat terkesan dengan sistem pendidikan di sana. Hasil kunjungan tersebut kemudian dibawa ke forum Konferensi Cabang Al Washliyah, dan diputuskan untuk mendirikan sekolah umum berbasis Islam. Mereka bahkan memasukkan bahasa Belanda dalam kurikulum, dan mendirikan sekolah dasar (volkschool) sebagai bagian dari strategi pendidikan yang menyatu antara agama dan ilmu umum.

Organisasi Al Ittihadiyah, yang juga lahir di Medan pada tahun 1935, turut berkontribusi dalam gerakan pembaruan pendidikan Islam. Di berbagai madrasah yang dikelolanya, Al Ittihadiyah mulai memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum, baik pada tingkat ibtidaiyah (setingkat sekolah dasar) maupun tsanawiyah (setingkat sekolah menengah pertama). Di tingkat ibtidaiyah, para siswa tidak hanya belajar ilmu-ilmu agama, tetapi juga diajarkan berhitung, bahasa Indonesia, ilmu bumi, ilmu hayat (biologi), dan sejarah. Sementara itu, di tingkat tsanawiyah, kurikulumnya semakin luas dengan penambahan mata pelajaran seperti bahasa Inggris, ilmu alam, dan penguatan pada bidang ilmu pengetahuan umum lainnya.

Langkah-langkah yang diambil oleh Al Ittihadiyah maupun organisasi-organisasi Islam lainnya yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan adanya pola yang sama: mereka berupaya mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam sistem pendidikan yang mereka bangun. Meskipun pada tahap awal integrasi tersebut lebih bersifat komplementer—yakni dengan memasukkan mata pelajaran umum ke dalam struktur madrasah yang sebelumnya murni religius—namun inisiatif ini menandai arah baru pendidikan Islam yang lebih inklusif dan



menyeluruh. Integrasi ini menjadi tonggak penting bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, karena menunjukkan kemampuan umat Islam untuk beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa meninggalkan identitas keagamaannya.

Keseluruhan dinamika integrasi ilmu agama dan pengetahuan umum yang dilakukan oleh berbagai organisasi Islam sejak awal abad ke-20 menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia telah lebih dahulu membangun model pendidikan yang progresif, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Inisiatif dari Muhammadiyah, Persis, NU, Al Washliyah, hingga Al Ittihadiyah membuktikan bahwa pendidikan Islam tidak tertutup terhadap ilmu modern dan bahkan telah mempraktikkan pendekatan holistik jauh sebelum negara melalui Orde Baru mewacanakan modernisasi pendidikan dalam kerangka ideologis yang hegemonik. Dengan demikian, proyek pendidikan Islam yang tumbuh dari bawah—berbasis komunitas dan aspirasi umat—sebenarnya merupakan counter narasi yang otentik terhadap model pendidikan Orde Baru yang cenderung sentralistik, seragam, dan menempatkan Islam dalam bingkai kontrol politik negara. Pendidikan Islam berbasis organisasi inilah yang justru memberi fondasi kuat bagi lahirnya sistem pendidikan Islam yang adaptif, mandiri, dan tetap berakar pada nilai-nilai keislaman.

Kesimpulan

Konsep dan kebijakan pendidikan Islam pada era Orde Baru menunjukkan hubungan yang kompleks antara keinginan umat Islam untuk memperkuat identitas keagamaan dan kebijakan negara yang cenderung sentralistik serta ideologis. Pemerintah Orde Baru menekankan stabilitas politik dan penanaman ideologi Pancasila secara masif melalui sistem pendidikan, yang berdampak pada terbatasnya ruang bagi pengembangan nilai-nilai pendidikan Islam secara kritis dan independen. Kebijakan ini ditandai dengan doktrinasi ideologi, pembatasan kebebasan akademik, dan pendekatan yang bersifat *top-down*.

Meskipun menghadapi banyak tantangan, pendidikan Islam tetap mengalami perkembangan signifikan selama masa ini. Pemerintah mulai mengakui eksistensi madrasah dan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dengan memberikan hak dan perlakuan setara seperti sekolah umum. Selain itu, diterapkannya kebijakan wajib belajar pelajaran agama Islam di semua jenjang pendidikan serta lahirnya lembaga-lembaga seperti MUI, UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989, dan Bank Muamalat Indonesia menunjukkan adanya peluang dan kemajuan penting bagi pendidikan Islam.

Pendidikan Islam pada masa Orde Baru berhasil bertahan dan bahkan berkembang dalam keterbatasan yang ada. Institusi-institusi Islam menunjukkan



kemampuan beradaptasi, mengembangkan sistem madrasah modern, serta memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum. Hal ini menjadi fondasi penting bagi transformasi pendidikan Islam di masa Reformasi dan seterusnya.

Penelitian masa depan disarankan untuk mengkaji lebih dalam dampak jangka panjang kebijakan pendidikan Islam era Orde Baru terhadap kualitas lulusan madrasah dan pesantren di masa kini. Fokus pada aspek kualitas pembelajaran, integrasi kurikulum agama dan umum, serta kompetensi sosial lulusan menjadi penting untuk dianalisis secara empirik.

Selain itu, studi perbandingan antara kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kontinuitas dan perubahan dalam pengelolaan pendidikan keagamaan di Indonesia. Pendekatan historis-politis ini akan memperkaya pemahaman tentang dinamika relasi antara negara dan institusi keagamaan dalam bidang pendidikan.

Penelitian lapangan di madrasah dan pesantren yang mengalami pertumbuhan pada masa Orde Baru juga layak dilakukan untuk mengetahui bagaimana lembaga-lembaga tersebut menyesuaikan diri terhadap tekanan ideologi negara sekaligus mempertahankan nilai-nilai Islam. Penggabungan pendekatan sejarah, sosiologi, dan kebijakan publik akan membantu memberikan pemetaan komprehensif atas peran pendidikan Islam dalam membentuk masyarakat Indonesia yang religius, adaptif, dan demokratis.

Daftar Pustaka

- Adams, Ernest; Rollings, Andrew (2003). *Andrew Rollings and Ernest Adams on Game Design*. Indianapolis: New Riders Publishing.
- Alam, Lukis. (2020). Islamic Education Policy Contestation in the Era of The New Order and the Reformation. *Ruhama: Islamic Education Journal*, 3(2), 59–79.
- Alfiyanti, D. G. (2023). Pembelajaran Terpadu Model Sequenced Di Sekolah Dasar. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(2), 1187–1196. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.754>
- Adibah, I. Z. (2020). Dinamika Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998). *Jurnal Inspirasi*, 4(2), 110–126.
- Arum, S., Setiawati, Y. P., & Kurniawan, D. H. (2020). Pola Pikir Mahasiswa dalam Menyelesaikan Masalah Terkait Konsep Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 123–131.
- Eliasaputra, M. P., Novalina, M., & Siahaan, R. J. (2020). Tantangan Pendidikan Agama Kristen di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pasca Kebenaran. *BONAFIDE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1(1), 1–22.
- Hakiki, M. (2015). *Konsep Pendidikan Islam Modern Menurut Pemikiran Dr.*



- Mohammad Natsir. (Skripsi). Pendidikan Agama Islam UIN Jakarta.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Huda, D. R. N., Rifa'i, A. N. R., Nindiasari, D. N., Pratama, D. F. N. P., & Khoiriyah, A. H. K. (2023). Pendidikan Islam Tradisional dan Modern. *Al-Riwayah : Jurnal Kependidikan*, 15(2), 262–272. <https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v15i2.949>
- Huda, M. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam di Masa Orde Baru dalam Mengatasi Krisis Ulama: Kajian Historis Lahirnya MAPK. *Kuttab*, 6(2), 234. <https://doi.org/10.30736/ktb.v6i2.1143>
- Jailani, M. S., & Muhammad, M. (2019). Kilas Balik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia pada Masa Orde Baru (1967-1997). *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, 19(1), 15–26. <https://doi.org/10.30631/innovatio.v19i1.75>
- Khoiruddin, M. (2018). Pendidikan Islam Tradisional dan Modern. *TASYRI': Jurnal Tarbiyah-Syari'ah*, 25(2), 92–105.
- Manageria, T., Ramdoni, M., Suryana, A., & Tarbiyah, F. (2021). Konsep Pemikiran Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Islam Menurut Hadratussyaikh KH M Hasyim Asy'ari. *Transformasi Manageria*, 1(1), 54–76.
- Nurmala, I. (2020). Kebijakan sebagai Proses Rasional dan Politik: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik: Kajian Kebijakan dan Manajemen Isu Strategis*, 10(1), 45–56.
- Rahmaniah, A. (2011). Pendidikan Islam dan Munculnya Gerakan Sosial Islam Indonesia. *el-Hikmah: Jurnal Kependidikan dan Keagamaan*, 8(2), 197–216.
- Sofyeni, R. A., Nurhaswinda, Balqis, R., Erli, I. S., & Mutiara, R. I. (2025). Memahami Konsep Peluang dan Aplikasinya. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(1), 801–812.
- Tolchah, H. M. (2015). *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Yuningsih, H. (2016). Politik Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Agama Islam di Masa Orde Baru. *Nur El-Islam*, 3(1), 50–62.